



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN MENURUT EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
(SE)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

FIRLY DESNAWATI
11325202508

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "ANALISIS REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN MENURUT EKONOMI NSYARIAH" yang ditulis oleh :

Nama : Firly desnaswati
NIM : 11325202508
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada

Hari / Tanggal : Senin, 16 Maret 2020
Waktu : 13.30 Wib
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Heri Sunandar, M.CL

Sekretaris

Mdhol Renaldi, SE, M.Ec

Penguji I

Drs. Zainal Arifin, MA

Penguji II

Bambang Hermanto, M.Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Analisis Realisasi Pencapaian Target
Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Karimun Menurut Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh :

Nama : **FIRLY DESNAWATI**
NIM : **11325202508**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Febuari 2020
Pembimbing Skripsi

Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL
NIP: 19660803 199303 1 004

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Firly Desnawati, (2020): Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Menurut Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis mengenai perkembangan Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapan Daerah Kabupaten Karimun Menurut Ekonomi Syariah. Penulis mengambil lokasi didaerah Kabupaten Karimun Kepulauan Riau yang merupakan salah satu instansi pemerintahan. Masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana analisis realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten karimun. Apa saja faktor yang mempengaruhi pencapaian target terealisasi penerimaan pajak aerah pada badan pendapatan daerah kabupaten karimun. Dan Analisis realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah pada kantor Badan Pendapan Daerah Kabupaten Karmun menurut ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini keseluruhannya adalah 73 orang. Karena jumlah populasi nya banyak maka penulis mengambil sampel 36 orang. Penulis menggunakan teknik porpositive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah badan pendapatan daerah kabupaten karimun kepulauan riau sedangkan objek adalah tentang pegawai badan pempapatan daerah kabupaten karimun kepulauan riau.

Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten karimun adalah tingkat kunjungan para wisatawan dalam/luar negeri, tingkat kesadaran membayar pajak bagi pengusaha hotel atau penginapan, sistem pelayanan pembayaran pajak belum menerapkan sistem online, turun-naiknya penerimaan pajak daerah dari sektor pertambangan, perkembangan bisnis dan perekonomian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan sya'faat beliau di hari kelak, aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datang dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayahanda Masmis, ibunda Juariah, dan kakanda Farry Rusmaili dan Rika Ramayanti yang selalu ada di hati sanubari ini.

2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta jajarannya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin , S.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H Maghfirah , M.A selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Syahpawi S.Ag Selaku Ketua Jurusan Ekonomi syari'ah dan Bapak Syamsurizal , SE, MSc, AK, CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syari'ah, serta bapak dan ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M. CL selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibuk Dr. Jenita,S.E,M.M selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dalam perkuliahan.
7. Kepada Bapak ibu Pengelolaan perpustakaan Fakultas syariah dan ilmu hokum serta pengelolaan perpustakaan UIN Suska Riau, terimakasih atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh pegawai badan pendapatan daerah kabupaten karimun kepulauan riau
9. Kepada sahabat terbaikku Muhammad Taslim, Siti Salmiah, Yosi Emelda, Uswatun Hasanah yang banyak memberikan nasehat, motivasi dan dukungan secara moril dan materil.
10. Kepada teman-temanku iemas syukriah, fitri dewi muspika, fera tafana putri, eka agustina, dan seluruh teman-temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimakasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Pekanbaru, Februari 2020
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

FIRLY DESNAWATI
NIM. 11325202508



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Karimun.....	11
B. Visi Dan Misi	12
C. Tugas Pokok Dan Fungsi	14
D. Struktur Organisasi	14
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pajak.....	18
B. Fungsi Pajak.....	21
C. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	22
D. Jenis-Jenis Pajak	23
E. Sistem Pemungutan Pajak.....	26
F. Manfaat Pajak	27
G. Pajak Daerah	27
H. Ciri-Ciri Pajak Daerah	33



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Pajak Dalam Pandangan Islam.....	34
J. Karakteristik Pajak (<i>Dharibah</i>) Menurut Syariat	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun..	40
B. Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Target Terealisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun	45
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

Daftar Pustaka



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Tabel

Tabel IV.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kabupaten Karimun	41
Tabel IV.2 Penerimaan Pajak di Kabupaten Karimun Tahun 2014-2018	44
Tabel IV.2 Jumlah Wisatawan yang Berkunjung di Kabupaten Karimun	48
Tabel IV.3 Lokasi dan Jumlah Hotel di Kabupaten Karimun.....	49



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHUALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban dari suatu negara adalah melayani kebutuhan dari masyarakatnya. Dalam penyelenggaraan berbagai tugas yang berguna untuk masyarakatnya. Dalam penyelenggaraan berbagai tugas yang berguna untuk masyarakat tersebut sudah tentu diperlukan biaya karena tanpa biaya maka negara tidak mungkin melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan sempurna. Dalam zaman modern sekarang ini biaya yang dimaksud identik dengan uang, walaupun terdapat pengecualian dalam hal pembiayaan dibantu secara material oleh pihak-pihak tertentu. Untuk mendapatkan uang, selain mencetak sendiri atau meminjam dari luar negeri banyak jalan yang ditempuh oleh pemerintah.¹

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Penganangan perdagangan bebas (*free trade*) membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu mengambil kesempatan yang timbul akibat adanya perubahan ekonomi internasional. Sebagai salah satu perangkat pendukung yang menunjang agar tercapai keberhasilan ekonomi dalam meraih peluang adalah hukum.

¹ Darwi., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2010), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum satu bagian yang disoroti adalah hukum pajak. Hukum pajak ini sering disebut dengan hukum fiskal yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak². Dengan kata memungut, terlihat adanya kegiatan mengambil kekayaan seseorang dan mengarahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Oleh karena itu, menurut Prof.DR.R.Soemitro,SH menyatakan bahwa pajak ditinjau dari segi ekonomi sebagai peralihan uang dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat atau pemerintah tanpa imbalan secara langsung dapat ditunjuk.

Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi belanja negara, sebagaimana yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara per tahunnya. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun anggaran selalu diupayakan mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak itu sendiri sebagai alat budgeter maupun alat regulator.³

Menurut P.J.A.Andriani, guru besar “*hukum pajak*” Universitas Amsterdam Belanda, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan , baik tidak mendapat pretasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”⁴.

² Waluyo, “*perpajakan indonesia*”, (jakarta:salemba empat.2007),ed 7 hlm.1

³ Yulita setiawan, *Perpajakan*, (Semarang:Andi Yogyakarta,2011),hlm.1

⁴ Azhari. 2007. *Pengantar: perpajakan & hukum pajak*. Pekanbaru : Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi pajak menurut S.I.Djajadiningrat “*pajak*” adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan, yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Daerah hukum pelaksana otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas Pasal 18 ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.” Dalam ayat 2 ditegaskan bahwa: “Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Kemudian dalam ayat 5 dinyatakan bahwa: “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”⁵

Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat, mempunyai kepentingan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membangun daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

⁵ Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Bandung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah bersumber pada pendapatan asli daerah itu sendiri. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunannasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom.

Setelah era reformasi sistem pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas :

1. Hasil pajak
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh pemerintah daerah.⁶

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-Mks atau juga bisa disebut Adh-Dharibah yang artinya adalah “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” atau suatu ketika disebut Al-Kharaj, akan tetapi biasanya digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

⁶ Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Menurut Yusuf Qardhawi Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan wajib pajak yang harus disetor kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kemabli dari Negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang sah.⁷

Berikut firman Allah dalam surah At-Taubah 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah sedekah (pajak) dari sebagian harta mereka, yang dengan itu kamu membersihkan dan mengembangkan mereka, dan mendoalah untuk mereka”.⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan Badan Pendapatan Pajak daerah Kabupaten Karimun mengatkan bahwa :”pajak di kabupaten karimun ini setiap tahunnya mengalami peningakan bisa dilihat dari pembangunan-pembangunan yang setiap tahunnya mengalami perubahan yang sangat baik”⁹

Dari masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan menuangkannya kedalam tulisan ilmiah yang berjudul: **Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapan Daerah Kabupaten Karimun Menurut Ekonomi Syariah.**

⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Pajak*, Terjemahan Fiqhus Zakat, Jakarta:PTPustaka. Litera Antar Nusa.1999 h 24

⁸ At-Taubah (9:103)

⁹ Damyati Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, wawancara, 05 Nopember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis hanya memfokuskan pembahasan pada Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karmun Menurut Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten karimun?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pencapaian target terealisasi penerimaan pajak daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten karimun?
3. Analisis realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karmun menurut ekonomi syariah

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Sesuaikan dengan rumusan
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai informasi untuk pengetahuan tentang Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Menurut Ekonomi Syariah.

F. Metode Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian**a. Subjek Penelitian**

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Dearah kabupaten karimun kepulauan Riau.

b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah pegawai badan pendapatan daerah kabupaten karimun kepulauan riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.¹⁰ Sampel adalah sebagai dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulan nya dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representarif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi.

¹⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Persada Media Group, 2006), h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun populasi dalam penelitian pegawai kantor badan pendapatan asli daerah kabupaten karimun yang berjumlah 73 orang, dari populasi tersebut maka penulis akan mengambil sampel 36 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh lebih akurat.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumen yang diajukan kepada pegawai.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi atau literatur berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk meneliti, mengamati, dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung dari beberapa narasumber menyangkut seputar yang terkait dan informasi yang berhubungan penelitian.
- c. Tinjauan pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan penelitian..

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif kualitatif* yaitu dimana setelah data dikumpulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif dan disimpulkan antara satu dengan data yang lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah penelitian.

7. Metode Penulisan

- a. Metode deskriptif adalah mengungkapkan uraian fakta yang diambil dari lokasi penelitian
- b. Metode deduktif adalah mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisa dan diuraikan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi

BAB III : TINJAUAN TEORI

Bab ini berisikan penjelasan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, asas pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, manfaat pajak, ciri pajak daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten karimun, faktor yang mempengaruhi pencapaian target realisasi penerimaan pajak daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten karimun, tinjauan ekonomi syariah terhadap analisis realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten karimun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**


 UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dikabupaten Karimun

Awalnya KPPD tanjung balai karimun dibawah naungan dan pembinaan provinsi riau dan polda riau, namun setelah pemekaran dan berdirinya provinsi kepulauan riau tahun 2005, maka KPPD tanjung balai karimun berada di lingkungan wilayah kepulauan riau di bawah kendali dan nuangan pemerintah provinsi kepulauan riau dan polda kepulauan riau. Sedangkan dinas pendapatan daerah provinsi kepulauan riau di bentuk pada tanggal 7 agustus 2004 berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat 1 kepulauan riau nomor 10/UMKGKR/VIII/2004 tentang pelaksanaan penghimpunan pajak daerah retribusi, sebagaimana yang telah ditetapkan undang-ubdag nomor 25 tahun 1999.

Pada bulan agustus 2004 merupakan langkah awal dinas pendapatan daerah provinsi kepulauan riau dalam melaksanakan pumungutan pajak daerah pada tahap awal dari tahun 2004 sampai 2006, dinas pendapatan daerah provinsi kepulauan riau nomor 10 dan 15/UMKGKR/VIII/2004 tentang pelaksanaan penghimpunan pajak daerah dan retribusi daerah untuk wilayah provinsi kepulauan riau .

Pada tahun 2006 sampai sekrang, pemerintah provinsi kepulauan riau telah memiliki payung sendiri, setelah dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kepulauan riau mengesahkan peraturan daerah provinsi kepulauan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

riau nomor 4 tahun 2006 tentang pajak daerah, dimana pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dipungut oleh kantor pelayanan pajak daerah (KPPD) di daerah masing-masing.

Kantor pelayanan pajak (KPPD) merupakan salah satu unsur pelaksanaan teknis dari dinas pendapatan daerah provinsi kepulauan riau yang bergabung dalam pelaksanaan operasional SAMSAT, disamping unsur dan instansi lain seperti polisi lalulintas dan polda kepri serta jasaraharja dari wilayah kepulauan riau.

B. Visi Dan Misi

1. Visi

Terwujudnya dinas pendapatan daerah sebagai organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan pendapatan secara konseptual visi pembangunan provinsi kepulauan riau mengarah pada tujuan pembangun jangka panjang menengah nasional. Untuk menunjang visi pemerintah daerah kabupaten karimun yaitu “terwujudnya kabupaten karimun yang maju dan berdaya saing berdasarkan iman dan taqwa”.

Maju dan berdaya saing diartikan sebagai kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kreatif, produktif dan inovatif yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infrastruktur dasar, berkembangnya pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, meningkatnya sumber daya manusia, meningkatkannya produktifitas kesehatan, serta meningkatnya peran dan partisipasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan iman dan taqwa diartikan sebagai kabupaten yang meletakkan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis dan kehidupan antar beragama yang harmonis. Sehingga dapat untuk mendukung visi provinsi kepulauan riau

2. Misi

Keberadaan misi merupakan pengimplementasi dari visi yang telah ditetapkan dan harus disusun secara optimal dan sistematis. Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh dinas pendapatan daerah provinsi kepulauan riau adalah sebagai berikut:”meningkatkan penerimaan daerah secara optimal, meningkatkan kualitas pembiayaan pembangunan dan mewujudkan pelaksanaan tugas prima melalui keterpaduan antar sektor dan antar pihak”.

Secara umum misi tersebut mengandung nilai-nilai pokok sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan daerah
- b. Terciptanya keterbukaan, keadilan dan kepastian hukum dalam kegiatan penerimaan pendapatan daerah.
- c. Meningkatkan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Kantor pelayanan pajak daerah karimun mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan kegiatan teknis, operasional, pemungutan PAD
- b. Melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaran bermotor (PKB dan BBNKB) di kantor bersama Samsat .
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada kantor bersama samsat.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota terkait dengan pemungutan PAD.
- e. Melaksanakan tugas ketatausahaan
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat, dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok kantor dinas pendaopatan daerah kabupaten karimun mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya
- b. Pengawasan serta teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas nya
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas lingkup tugasnya

D. Struktur Organisasi

Dinas pendapatan karimun terdiri dari :

1. Kepala kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub bagian tata usaha
3. Seksi penerimaa dan penetapan
4. Seksi penagihan, pembukuan dan pelaporan

Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala kantor

Kepala kantor pelayanan pajak daerah mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasi pelaksanaan teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Dan mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan gubernur. Kepala kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.

2. Sub bagian tatausaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat.
 - b. Melayani surat menyurat kantor
 - c. Menyusun kearsipan surat menyurat kantor
 - d. Melayani urusan rumah tangga
 - e. Melayani urusan kehumasan
 - f. Melaksanakan pengelolaan adminidtrasi kepegawaian
 - g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
 - h. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi penerimaan dan penetapan
 - a. Melaksanakan penetapan obyek dan subyek pajak daerah diwilayah kerjanya
 - b. Menyiapkan surat pemberitahuan (SPT) pajak daerah
 - c. Melaksanakan penetapan pajak
 - d. Menerbitkan surat keterangan pajak daerah (SKPD)
 - e. Merencanakan penerimaan pajak
 - f. Melaksanakan pengurangan, penghapusan dan pembatalan penetapan pajak
 - g. Melaksanakan administrasi dan menyediakan pertimbangan terkait keberadaan restitusi
 - h. Menerima dan menindak lanjuti kelengkapan administrasi mutasi obyek pajak
 - i. Menyusun laporan data obyek dan penetapan pajak daerah
 - j. Melaksnakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor
4. Seksi penagihan, pembukuan dan pelaporan
 - a. Meniliti dan menghimpun tindakan bukti pembayaran dari bendahara penerimaan dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setoran
 - b. Menerima dan menghimpun tunggakan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan
 - c. Menerbitkan surat keterangan viscal (SKF) atau surat keterangan pelunasan pembayaran pajak daerah

- d. Menerima, membukukan, dan menindaklanjuti surat teguran, surat ketetapan pajak daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan oprerasional.
- e. Melakukan pengecekan dilapangan terkait dengan permohona keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan pengaduan masyarakat.
- f. Menyusun laporan penerimaan kas dan mengirim kedinas melalui sub bagian tata usaha
- g. Menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan pajak daerah
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Pajak memegang peranan yang penting bagi suatu negara yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber-sumber ekonomi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹

Menurut *Rochman Soemitro*, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dapat yang dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa (Timbal/Contra Prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹²

Menurut *Siahan, Merihot P*, pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara/Pemerintah berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarkannya dengan tidak

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

¹² Mardiasomo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan presentase kembali/contra prestasi atau balas jasa, secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.¹³

Menurut *Ismawan* pajak adalah iuran kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (contra prestasi) yang langsung dapat di tujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum penarikan pajak secara yuridis dapat di paksakan atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh wajib pajak (WP) dalam jangka waktu tertentu maka penagihan dapat dilakukan secara kekerasan seperti melalui surat paksa, sita, lelang, dan sandera.¹⁴

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memerikan batasan tentang pajak, di antaryapengertian pajak yang dikemukakan oleh. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang waib membayarnya menurut paturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.¹⁵

Menurut Azhari, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

¹³ Siahan P, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), h.7

¹⁴ Ismawan Indra, *Memahami Reformasi Perpajakan*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2001), h. 4

¹⁵ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2009), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁶

Menurut Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁷

Bahwa ciri-ciri pajak yang melekat dalam pengertian pajak sebagai berikut :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah
4. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.¹⁸

¹⁶ Azhari, *Perpajakan I (pajak Penghasilan)*, (Pekanbaru: UR Press, 2010), h. 1

¹⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h. 12

¹⁸ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta, Salemba Empat, 2011), h. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Fungsi Pajak

Dari pengertian pajak yang dijelaskan oleh beberapa ahli di atas bahwa pajak secara teoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat, terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

4. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

5. Tarif pajak untuk ekspor diperkecil untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.¹⁹

Meski demikian dalam pengaduan Ricrhad Burton dan Wirawan B.Ilyas, terdapat pula fungsi lain dari pajak yang saat ini mengemukakan, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Fungsi demokrasi menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Sebagai implementasinya, pajak memiliki konsekuensi

¹⁹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat: 2011), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memberikan hak-hak timbal balik yang meskipun tidak diterima langsung, tetapi diberikan kepada warga Negara pembayar pajak. Demikian selanjutnya hingga pajak akan berfungsi redistribusi, yaitu mengimplementasikan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Bila pajak diterapkan dengan baik maka dapat dipastikan terjadi beberapa dampak pajak terhadap perekonomian dan berbagai aspek.²⁰

C. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith di dalam Supramono, dan Theresia Woro Damayanti menyebutkan bahwa, pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas:

1. *Equality*

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

2. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tariff pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

²⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of Collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (*seefisien*) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.²¹

D. Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dibedakan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. Pengelompokan pajak sebagai berikut:

1. Jenis pajak menurut golongannya

a. Pajak langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena penggunaan pajaknya adalah langsung kepada wajib pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada wajib pajak lain.

²¹ Supramono, dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pajak tak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah contoh dari pajak yang menjadi Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya adalah penjualnya yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan pajak pertambahan nilai dapat dilimpahkan kepada pembeli (pihak lain).

2. Jenis pajak menurut sifatnya

a. Pajak Subyektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat obektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak). Contoh: Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak subyektif, karena pengenaan pajak penghasilan memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang menerima penghasilan.

b. Pajak Obyektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contoh:

- 1) Pajak pertambahan nilai (PPN), karena pengenaan pajak pertambahan nilai adalah peningkatan nilai dari suatu barang, bukan pada penjual yang meningkatkan nilai barang.
- 2) Pajak bumi dan bangunan (PBB), karena PBB dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan keadaan pemiliknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis pajak menurut lembaga pemungutannya

a. Pajak pusat (negara)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak pertambahan nilai dan Pajak penjualan barang mewah PPN dan PPnBM)
- 3) Bea Materai
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan (BPHTB)

b. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 34 tahun 2000 Pajak daerah dibedakan menjadi:

1) Pajak provinsi

Contoh: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2) Pajak Kabupaten/kota

Contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan.²²

²² Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Ada beberapa sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Indonesia yaitu:

1. *Official assessment system*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya wajib pajak terutang pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *With Holding system*

With Holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

F. Manfaat Pajak

Disebagian negara berkembang, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dapat menunjang jalannya roda pemerintah dalam hal pembiayaan pembangunan, sehingga tanpa pajak bisa jadi sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.

Dana pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiapwarga mulai dilahirkan sampai dengan meninggalkan dunia dapat menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, membayar utang negara ke luar negeri, membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baik dalam hal pembinaan maupun permodalan.²³

G. Pajak Daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan

²³ <http://www.nusahati.com>, diakses 2 Desember 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah atau pembangunan daerah.²⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah yaitu Kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁵

Menurut Mardiasmo, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.²⁶

Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa jenis pajak Kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

²⁴ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

²⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak dan Retribusi Daerah

²⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pajak Mineral Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
10. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.²⁷

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan dari pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah diantaranya:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.²⁸

²⁷ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak dan Retribusi Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya. Berikut ini tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni:

- a. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.
- b. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%,
- b. Tarif untuk batuan sebesar 20%.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

- a. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.
- b. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.

11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.²⁹

H. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip pajak daerah maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
3. *Tax base*-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).³⁰

²⁹ Dwi Damas Anggro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang, UB.Press, 2017),

h. 66

³⁰ Mardiasmo, *op.cit*, h. 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Pajak Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, masalah pembayaran pajak merupakan salah satu masalah yang cukup serius dan diperhatikan. Hal ini mengingat pembayaran pajak dapat membantu mensejahterakan masyarakat luas jika disalurkan dengan baik dan benar.

Begitu pedulinya Islam, sampai-sampai Allah SWT menerangkan dalam al-Quran bahwa orang yang tidak mau membayar pajak atau *jizyah* boleh diperangi karena mereka tergolong orang-orang yang tidak beriman. Selain itu, Allah SWT juga menerangkan larangan untuk memakan harta orang lain dengan jalan bathil. Hal ini sesuai dengan yang diterangkan di dalam al-Quran Surat Annisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.(QS. Annisa : 29)

Berdasarkan ayat di atas dapat kita pahami bahwa memakan harta orang lain dengan jalan bathil itu sangat dibenci oleh Allah apalagi dari hasil pembayaran pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Dan pajak dalam pandangan Islam dapat juga dilihat dalam al-Quran Surat Al-Taubah ayat 29 yang berbunyi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. al-Taubah : 29)

Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman (definisi) yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT. Jika hal itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk ibadah. Demikian pula petugas pajak, jika pajak itu sesuai syariat, maka apa yang ia lakukan tertentu bernilai jihad baginya. Sebab, sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT dan mendapat balasan (QS. Al-Zalzalah : 99: 7).

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. (QS. Al-Zalzalah : 7).

1. Pengertian pajak menurut syariah

Dalam ajaran Islam pajak sering diistilahkan dengan *adh-dharibah* yang jamaknya *adh-dhorib*, ulama-ulama dahulu menyebutnya dengan *al-muks* yang memberikan istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-dharibah* di antaranya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Al-jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah)
- b. Al-kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh negara)
- c. Al-usyr (bea cukai para pedagang non muslim yang masuk agama Islam)

Pajak dalam bahasa arab disebut dengan *dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan. Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama *al-dharibah*, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara.³¹

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib bahkan sebagaimana ulama menyebut *kharaj* merupakan *dhariabah*.

Ada beberapa ulama yang mendefinisikan tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-zakah*, Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-iqtisha al-islami az-zakah wa ad-dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-amwal fi daulah al-khilafiyah*, yang

³¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Pressh, 2005), h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ringkasannya sebagai berikut: Abdul Karim Zaidan mendefinisikan “Syariat adalah apa saja ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk hambanya baik melalui Al-Qur’an ataupun sunnah nabi Saw berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan. Dr. Yusuf Qardhawi mendefinisikan Syariat.” Syariat adalah apa saja ketentuan Allah SWT yang dapat dibuktikan melalui dalil-dalil Al-Qur’an maupun sunnah atau juga melalui dalil-dalil ikutan seperti ijma, qiyas, dan lain sebagainya”.

Mengingatnya betapa mutlaknya peranan pajak bagi Eksistensi negara dan kemaslahatan rakyat(jika dikelola secara benar), Islam memberi perhatian super serius melalui ajaran utamanya (rukun Islam), yakni Zakat. Sepanjang sejarah negara pajak telah berkembang (berevolusi) melalui tiga konsep:

- a) Pajak sebagai upeti (*dharibah*) yang harus dibayar oleh rakyat semata-mata karena mereka adalah hamba yang harus melayani kepentingan sang penguasa sebagai tuannya.
- b) Pajak dikonsepsikan sebagai imbalan jasa (*jizyah*) dari rakyat kepada penguasanya. Konsep ini muncul setelah rakyat membayar pajak (*tax payers*) mulai menyadari bahwa raja penguasa bukanlah dewa yang boleh memperlakukan rakyat semuanya. Penguasa adalah manusia juga yang memegang kuasa karena mandat dari rakyatnya, baik rakyat membayar pajak maupun penguasa pemungut pajak kurang lebih adalah manusia yang setara. Maka jika penguasa memungut pajak tidak boleh lagi cuma-cuma, pajak harus diimbangi dengan pelayanan kepada rakyat yang membayarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pajak sebagai sedekah karena Allah SWT, sang pencipta langit dan bumi untuk keadilan dan kemakmuran bagi semua.³²

2. Karakteristik Pajak (*Dharibah*) Menurut Syariat

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu:

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika *baitul mall* tidak ada harta atau kurang. Ketika *Baitul Mall* sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang dipungut, sungguhpun tidak ada lagi pihak membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak non-Islam (*tax*) adalah abadi (selamanya)
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam (*tax*) ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.

³² *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam (*tax*), pajak kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya., melainkan semata-mata melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikuasai atau dikonsumsi.
- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan. Sedangkan teori pajak non-Islam (*tax*) tidak ada batasan pemungutan, selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Hal ini sudah di praktikan oleh Rasululla Saw. Sedangkan menurut teori non-Islam (*tax*), pajak tidak akan dihapus karena hanya itulah satu-satunya sumber pendapatan. Malahan ada suatu ungkapan orang inggris yang mengatakan bahwa ada dua hal yang pasti di dunia ini, yaitu kematian dan pajak.³³

³³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang analisis realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun ditinjau menurut ekonomi syariah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Karimun selalu mengalami peningkatan dari target yang telah ditentukan, hal ini tidak luput dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.
2. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target terealisasi penerimaan pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah penduduk, jumlah petugas pajak, jumlah perusahaan, pendapatan perkapita.
3. Tinjauan ekonomi syariah terhadap analisis realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Karimun melalui Badan Pendapatan Daerah lebih meningkat objek-objek yang bisa menghasilkan pendapatan bagi daerahnya.
2. Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karimun sudah sangat baik sehingga perlu di pertahankan jika perlu di lakukan peningkatan setiap tahunnya.
3. Badan Pendapatan Daerah terus melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru dan wajib pajak yang telah terdaftar untuk menghindari penurunan penerimaan pajak daerah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Pustaka

- Andika Pratama, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, *wawancara*, 05 Nopember 2019
- At-Taubah (9;103)
- Azhari, *Perpajakan I (pajak Penghasilan)*, (Pekanbaru: UR Press, 2010),
- Azhari. 2007. *Pengantar: perpajakan & hukum pajak*. Pekanbaru : Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Persada Media Group, 2006),
- Darwi,. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2010),
- Dwi Damas Anggro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang, UB.Press, 2017),
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta, Salemba Empat, 2011),
- Firdaus, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, *wawancara*, 05 Nopember 2019
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Pressh, 2005),
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers ,2011),
- <http://www.nusahati.com>, diakses 2 Desember 2019
- Ismawan Indra, *Memahami Reformasi Perpajakan*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2001),
- M. Ramadhan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, *wawancara*, 05 Nopember 2019
- Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008),
- Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008),
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mardiasomo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Hasby, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, *wawancara*, 05 Nopember 2019

Muljadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009),

Nurhayati, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, *wawancara*, 05 Nopember 2019

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Bandung.

Siahan P, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005),

Supramono, dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005),

Syukur, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, *wawancara*, 05 Nopember 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat: 2011),

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2009),

Waluyo, "*perpajakan indonesia*", (jakarta:salemba empat.2007),ed 7

Yandi Rawil, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, *wawancara*, 05 Nopember 2019

Yayan Musfita, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, *wawancara*, 05 Nopember 2019

Yulita setiawan,*Perpajakan*, (Semarang:Andi Yogyakarta,2011),

Yusuf Qardhawi, *Hukum Pajak*, Terjemahan Fiqhus Zakat, Jakarta: PTPustaka. Litera Antar Nusa. 1999

Zarkasji Abdussalam, *Siyasah Maliyah*, (Yogyakarta: 1980),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, *Perpajakan I (pajak Penghasilan)*, (Pekanbaru: UR Press, 2010)
- _____. 2007. *Pengantar: perpajakan & hukum pajak*. Pekanbaru : Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Persada Media Group, 2006)
- Darwi., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2010)
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta, Salemba Empat, 2011)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- _____, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011)
- <http://www.nusahati.com>, diakses 2 Desember 2019
- Ismawan Indra, *Memahami Reformasi Perpajakan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2001)
- Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008)
- Mardiasomo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008)
- Muljadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009)
- Siahan P, Marihot , *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005)
- Supramono, dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat: 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2009)

Yulita setiawan, *Perpajakan*, (Semarang: Andi Yogyakarta, 2011)

Yusuf Qardhawi, *Hukum Pajak*, Terjemahan Fiqhus Zakat, Jakarta: PTPustaka. Litera Antar Nusa. 1999

Zarkasji Abdussalam, *Siyasah Maliyah*, (Yogyakarta: 1980)



DAFTAR WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana penerimaan pajak daerah dikabupaten Karimun?
2. Apa saja upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak?
3. Bagaimana pengaruh wisatawan terhadap penerimaan pajak daerah?
4. Apakah hotel menjadi salah satu penyumbang penerimaan pajak terbesar?
5. Apakah pertumbuhan penduduk memiliki kontribusi dalam peningkatan penerimaan pajak daerah?
6. Apakah petugas pajak berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak daerah?
7. Penyumbang terbesar apakah yang termasuk dalam penerimaan pajak daerah?
8. Apakah pendapatan perkapita mempunyai andil yang cukup besar dalam penerimaan pajak daerah?

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“ANALISIS REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN MENURUT EKONOMI NSYARIAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : **FIRLY DESNAWATI**
NIM : **11325202508**
Program Studi : **Ekonomi syariah**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Maret 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Heri Sunandar, M.CL

Sekretaris

Afdhol Renaldi, SE, M.Ec

Penguji I

Drs. Zainal Arifin, MA

Penguji II

Bambang Hermanto, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email, admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: FIRLY DESNAWATI
 : 11325202508
 : EKONOMI SYARIAH
 : ANALISIS REALISASI PENCAPAIAN TARGET
 PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KANTOR
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
 KARIMUN MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pembimbing : Dr. Drs. Heri Sunandar, M. CL

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 April 2020

An. Pimpinan Redaksi


 M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung B1 Lantai I Pulau Dompak Tanjungpinang Kepulauan Riau
TANJUNGPINANG

Kode Pos 29124

REKOMENDASI

Nomor : 756/2n.1/DPMPTSP/IX/2018

:	1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
:	2.	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41).
:		Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/13104 Tanggal 20 Agustus 2018

KAPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU, memberikan rekomendasi kepada:

a.	Nama/Obyek	:	Firly Desnawati
b.	NIM/Perguruan Tinggi/Jurusan/Jenjang	:	11325202508/UIN Suska Riau/Ekonomi Islam/S1
c.	Untuk	:	Melakukan Rekomendasi Penelitian, dengan berjudul "Pemanfaatan Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Kinerja Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun Menurut Ekonomi Islam".
	1)	Lokasi Penelitian :	- Kabupaten Karimun
	2)	Waktu/Lama Penelitian :	selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat;
	3)	Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat;	
	4)	Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.	

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk seperlunya.

DIBUAT DI : TANJUNGPINANG
PADA TANGGAL : 3 September 2018
a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

H. AZMAN TAUFIK
Pembina Utama Madya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28125



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/13104
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/13104/PP.00/16166/2018 Tanggal 20 Agustus 2018, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : FIRLY DESNAWATI
2. NIM / KTP : 11325202508
3. Program Studi : EKONOMI ISLAM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PEMANFAATAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA BADAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KARIMUN MENURUT EKONOMI ISLAM.
7. Lokasi Penelitian : BADAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KARIMUN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Dengan Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Agustus 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung B1 Lantai I Pulau Dompok Tanjungpinang Kepulauan Riau
TANJUNGPINANG

Kode Pos 29124

Tanjungpinang, 04 September 2018

Kepada Yth.

Ka. Badan Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Karimun

di -

Tempat

070/513 /DPMPTSP-06/2018

1 (satu) berkas

Penyampaian Rekomendasi
Penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terlampir bersama ini disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor : 756/2n.1/DPMPTSP/IX/2018 tanggal 3 September 2018 atas nama Firly Desnawati dengan judul "Pemanfaatan Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Kinerja Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun Menurut Ekonomi Islam".

Demikian untuk dimaklumi dan terimakasih.

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



H. AZMAN TAUFIK

Pembina Utama Madya

NIP. 19580727 198603 1 031

UIN SUSKA RIAU

Gubernur Kepulauan Riau (sebagai laporan)

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Pemda Karimun Gedung Balai Selendang Lantai II
Jalan Jend. Sudirman-Pusat Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau 29021
Email : kesbangpol@karimun.go.id

Tanjung Balai Karimun, 12 September 2018

Kepada:

Yth. Kepala Badan Kebersihan dan
Pertamanan

Di

TEMPAT

071/BAKESBANGPOL/IX/131/2018

Penting

Lembar

Penyampaian

Rekomendasi Penelitian/ Riset

Dalam Rangka Mempelancarkan Pelaksanaan Kegiatan ,Bersama Ini
Terlampir disampaikan rekomendasi Penelitian , Nomor: 071/KESBANGPOL/IX/131/2018
tanggal 12 September 2018. Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama/Obyek : FIRLY DESNAWATI
NIM/Jurusan/ : 11325202508/Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum /Ekonomi
Fakultas/Jenjang : Islam
Judul : Pemanfaatan Pajak Penerangan Jalan Dalam
Meningkatkan Kinerja Badan Kebersihan dan
Pertamanan Kabupaten Karimun Menurut Ekonomi
Islam

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya untuk dapat ditindaklanjuti
ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARIMUN
Kabid. Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

SUGIONO, S.Ag., M. M
Pembina /IV a
NIP. 19690505 199303 1 027

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun (sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau Pekanbaru;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Pemkab Karimun Gedung Bukit Selembak Lantai II
Jalan Jend. Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau 29631
Email : kesbangpolkabkarimun@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor: 071/BAKESBANGPOL/DK/131/2018

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 07).
 3. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah.
- : Surat dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor: 070/573/DPMPSTP-06/2018

KABUPATEN KARIMUN, memberikan

- Rekomendasi kepada:
- Nama/Obyek : Firly Desnawati
- NPM/NIDN/KTP/ : 11325202508/Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/Jurusan Ekonomi Islam
- Jurusan/Fakultas/ : Penelitian/ Riset
- Tempat : Pemanfaatan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan kinerja badan kebersihan dan pertamanan kabupaten karimun menurut ekonomi islam
- Unit : Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasir Panjang Kabupaten Karimun
1. Selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
2. Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat.
3. Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.

: Drs.Suhayib,M.Ag

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dibuat di : Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal : 12 September 2018

KABUPATEN KARIMUN
Kahid. Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

SUGIONO, S.Ag., M. M
Pembina/IV a
NIP. 19690505 199303 1 027

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Firly Desnawati, bertempat lahir di Tanjung Batu, Kepulauan Riau, pada tanggal 08 Desember 1995. Anak Ketiga dari Tiga bersaudara dari pasangan ayahanda Masmis dan ibunda Juairiah. Penulis sendiri berdarah Melayu yang didapat dari kedua orang tua. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis sebagai berikut, menyelesaikan pendidikan SDN 01 Kundur Barat Tahun 2007, menyelesaikan pendidikan SMP 1 Kundur Barat Tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan SMA 04 Kundur 2013. melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, mengambil jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan PKL di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, dan juga telah melaksanakan KKN di Sawang Laut. Penulis melaksanakan penelitian yang berjudul “Analisi Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Menurut Ekonomi Syariah” lulus sebagai Sarjana Ekonomi Syariah setelah di Munaqasyahkan dengan hasil sangat memuaskan pada hari Senin, Tanggal 16 Maret 2020.